

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS: PROPINSI SUMATERA SELATAN DAN BENGKULU)

Asmanita *)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series yang merupakan data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik. Analisa yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan alat analisis indeks Gini ratio, dan indeks Williamson. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil penelitian Indeks Williamson apabila dibandingkan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu ternyata Propinsi Bengkulu adalah propinsi yang memiliki IW cukup tinggi dengan rata-rata 0,43 yang menunjukkan tingkat ketimpangan antar wilayah yang semakin tinggi pula. Sebaliknya, Propinsi Sumatera Selatan adalah propinsi yang memiliki tingkat IW yang rendah dengan rata-rata 0,125 artinya ketimpangan daerahnya juga rendah dan pemerataan di daerahnya menjadi tinggi. Dari hasil analisis antara Indeks Williamson dengan Indeks Gini terdapat persamaan hasil. Dimana dari dua hasil perhitungan ini setiap tahun nilai ketimpangannya semakin menurun di setiap tahunnya

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Indeks Gini Rasio, Indeks Williamson.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan, dengan demikian pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian: Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Di negara-negara miskin, perhatian utama lebih terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan, namun keduanya hampir sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan, pengutamaan yang satu akan menuntun pengorbanan yang lain. Pembangunan ekonomi yang lebih tinggi mensyaratkan penerimaan GNP yang tinggi pula. Namun yang menjadi masalah bukan hanya tingkat

GNP yang tinggi, tapi bagaimana hasil dari pembangunan ekonomi itu dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Todaro, 2000:177).

Ketimpangan mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan, karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan yang kaya dan miskin. Rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi.

Berdasarkan angka koefisien gini (indikator standar mengukur ketimpangan), Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam 30 negara paling merata sedunia dengan angka koefisien gini sebesar 0,32 (diperingkat ke 26 dari data Bank Dunia, *World Development Indicator* 2002). Tingkat ketimpangan di Indonesia, bisa saja, jauh lebih besar daripada yang terukur dengan menggunakan indikator-indikator standar selama ini (Arief, 2006).

*) Dosen LB FE Univ-PGRI Plg

Tabel 1
Jumlah Penduduk Indonesia, Provinsi Sum-Sel, dan Provinsi Bengkulu
Tahun 2001-2006

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (jiwa)	Jumlah Penduduk Provinsi Sum-Sel (jiwa)	Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu (jiwa)
2001	208.946 ribu	6.343.104	1.592.926
2002	212.003 ribu	6.430.188	1.640.597
2003	215.276 ribu	6.518.791	1.517.181
2004	216.382 ribu	6.628.416	1.541.551
2005	219.205 ribu	6.755.900	1.598.177
2006	222.142 ribu	6.899.892	1.598.177

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2001-2006

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu semakin bertambah setiap tahunnya. Pertambahan penduduk ini menimbulkan banyaknya kemiskinan karena pertambahan penduduk tidak diikuti dengan semakin banyaknya lapangan usaha kerja. Jumlah penduduk Propinsi Sumatera Selatan tahun 2001 sampai dengan 2006, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dari tahun ke tahun tersebut tidak begitu besar yaitu berkisar antara 1-2%. Jumlah

penduduk Propinsi Bengkulu tahun 1999 sampai dengan 2006, terlihat sangat fluktuatif artinya ada beberapa tahun yang mengalami peningkatan dan ada tahun yang mengalami penurunan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan regional Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu, dibutuhkan juga data-data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Berikut adalah tabel PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku:

Tabel 2
PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2002-2006 (Juta Rupiah)

	2002	2003	2004	2005	2006
PDRB DENGAN MIGAS	49.500.159	55.938.675	64.319.375	81.531.510	95.929.140
PDRB TANPA MIGAS	35.773.989	40.113.615	45.470.766	52.726.675	63.500.445

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, Tahun 2002-2006

Tabel di atas mencantumkan total PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan dapat diketahui bahwa total PDRB tersebut dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Apabila dibandingkan PDRB dengan migas jauh lebih besar nilainya daripada PDRB tanpa migas. Sama halnya dengan tabel sebelumnya, diketahui bahwa Propinsi Sumatera Selatan total PDRB dengan migas memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada total PDRB tanpa migas. Berbeda dengan

Sumatera Selatan, propinsi Bengkulu tidak membedakan total PDRB propinsinya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
PDRB Bengkulu Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)

Tahun	Total PDRB
2000	4.868.099
2002	6.276.077
2003	7.251.985
2004	8.104.894
2005	10.008.450

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Soeroso dan Biarratani dalam Sulistina (2005:2) mengungkapkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah telah menarik modal dan tenaga kerja ke daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pola pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan di daerah yang tinggi kegiatan ekonominya tinggi, cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan di daerah yang tinggi kegiatan ekonominya rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas dan menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antara dua propinsi yang berbeda yaitu Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah adakah ketimpangan pendapatan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam memecahkan masalah mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Todaro (1997:138) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur dan bertambah luasnya kegiatan produksi dari kegiatan ekonomi daerah. Kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan dan menghasilkan barang dan jasa berpengaruh pada penggunaan faktor produksi dalam jumlah dan kualitas.

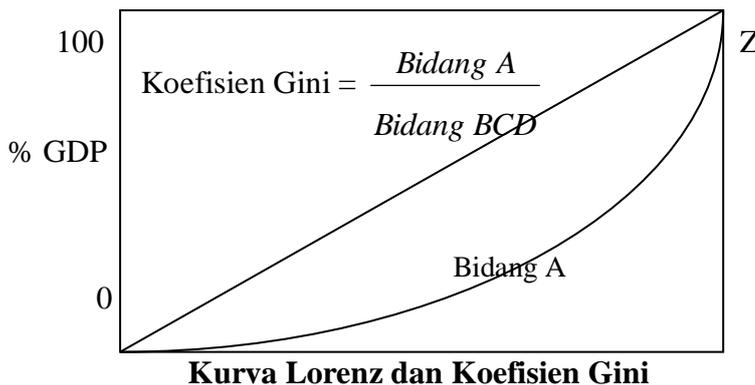
Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mempunyai dampak multiplier atau yang dikenal dengan *trickle down effect* atau penetesan ke bawah semakin besar. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari PDRB dapat dilihat beberapa indikator turunan yang mencerminkan lebih rinci perkembangan perekonomian antara lain struktur perekonomian, pendapatan perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi (Machmud, 2002:25). Tingginya nilai pendapatan perkapita mencerminkan kesejahteraan suatu daerah semakin baik, sehingga PAD yang akan

diterima suatu daerah juga akan meningkat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi regional antar Kabupaten atau Kota adalah dengan Indeks Williamson. Williamson dalam (Kuncoro, 2004:133) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Disparitas ekonomi regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih 'matang' dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Disamping metode Indeks Williamson di atas, untuk menganalisis pendapatan adalah dengan menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang diperoleh dari total pendapatan selama satu tahun.

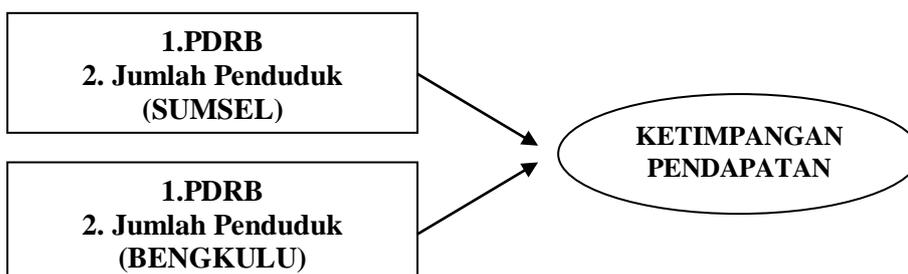
Perangkat terakhir yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relatif di suatu negara adalah dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat di mana Kurva Lorenz itu berada. Untuk lebih jelas lihat kurva di bawah ini :



Pada kurva di atas menunjukkan rasio Konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) atau Koefisien Gini (*Gini Coefficient*) dengan cara merasiokan daerah A yang diarsir dengan luas segi tiga BCD. Koefisien Gini adalah ukuran

ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Pemerataan akan semakin sempurna apabila koefisien Gini mendekati angka nol, dan sebaliknya jika koefisien Gini mendekati satu maka ketimpangan akan sempurna.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Zaman (2006) mengenai Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Sumatera Selatan menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten atau kota di Sumatera Selatan selama periode 1994-2004 rata-rata per tahun hampir sama untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 4,09 persen, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 4,67 persen, Kabupaten Musi Rawas sebesar 4,95 persen dan Kota Palembang sebesar 4,86 persen. Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada kabupaten atau kota di Sumatera Selatan dikarenakan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda, ada daerah penghasil migas (minyak dan gas bumi) dan bukan penghasil migas.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari perumusan masalah dan kerangka teori diatas maka hipotesis yang dapat diambil adalah diduga terdapat ketimpangan pendapatan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan kurun waktu 5 tahun, dan menitikberatkan pembahasan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar kedua Propinsi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terkait dengan

masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional yang berupa publikasi resmi dari berbagai instansi yang dianggap sebagai sumber penyaji data yang valid untuk data yang dimaksud, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Teknik Analisis

Pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori.

3.3.1. Indeks Williamson

Untuk melihat ketimpangan Pendapatan dikawasan Sumatera Selatan dan Bengkulu digunakan Indeks Williamson sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^k (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \quad 0 \leq V_w \leq 1$$

Keterangan :

- Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten atau Kota ke i
- Y = PDRB perkapita Propinsi
- f_i = Jumlah penduduk Kabupaten atau Kota ke i
- n = Jumlah penduduk
- i = 1,2,.....k
- k = Jumlah Kabupaten atau Kota
- $V_w = 0$, artinya ketimpangan baik
- $V_w = 1$, artinya ketimpangan buruk

2. Indeks Gini

Angka koefisien gini merupakan indikator standar untuk mengukur ketimpangan.

Rumus:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{t+1} - X_i)(Y_i + Y_{t+1})$$

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n f_i(Y_i + Y_{t+1}) \quad 0 < G < 1$$

Keterangan:

G = Rasio Gini

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

X_i = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas $-i$

Y_i = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas $-i$

Gini Rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, jika nilai gini rasio mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, apabila mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

3.4. Batasan Operasional Variabel

Adapun beberapa variabel operasional yang digunakan adalah:

1. Ketimpangan PDRB adalah perbedaan tingkat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di suatu daerah tertentu jika dibandingkan dengan daerah lain yang ditinjau dari PDRB setiap daerah.
2. Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan kondisi ekonomi yang dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), seperti Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.
3. PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada waktu tertentu di Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

4. PEMBAHASAN

Propinsi Sumatera Selatan merupakan propinsi yang memiliki nilai pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah yang tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain.. Tingginya pendapatan daerah ini memiliki dampak positif terhadap

pembangunan wilayah Propinsi Sumatera Selatan karena setiap pembangunan tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Tingginya pendapatan daerah ini merupakan potensi yang harus terus dikembangkan oleh pemerintah daerah sehingga masalah anggaran dalam upaya pengembangan wilayah Propinsi Sumatera Selatan dapat teratasi. Hal ini sepertinya berbanding terbalik dengan Propinsi Bengkulu.

4.1. Analisis Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan yang terjadi antar daerah dapat dilihat melalui nilai PDRB, yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar daerah satu dan daerah lain. Distribusi PDRB Sumatera Selatan secara keseluruhan jauh lebih besar apabila dibandingkan Bengkulu, dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan sebelumnya. Sumatera Selatan unggul pada PDRB dan distribusi PDRB karena Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar, luas wilayah yang besar dan memiliki sektor pertambangan dan penggalian khususnya subsektor minyak dan gas bumi. Propinsi Bengkulu sangat kecil distribusi PDRBnya, hal ini terlihat pada sektor pertambangan dan penggalian, sebaliknya sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi propinsi Bengkulu.

Tabel 4
Koefisien Indeks Gini Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu 2001-2004 (Dalam Persen)

Tahun	Sumatera Selatan	Bengkulu
2001	0,90	0,90
2002	0,83	0,83
2003	0,74	0,76
2004	0,64	0,65
Rata-rata	0,77	0,78

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu selama periode 2001 sampai dengan 2004 mengalami penurunan, dengan indeks yang hampir sama di setiap tahunnya selama 2 tahun, yaitu tahun 2001 dan tahun 2002. Seperti yang terjadi pada tahun 2001, tingkat Indeks Gini di kedua Propinsi tersebut sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu kurang merata.

Tahun 2002, nilai Indeks Gini di kedua Propinsi tersebut menurun yaitu sebesar 0,83. hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan semakin membaik, namun tidak dapat juga dikatakan tingkat distribusi pendapatan di kedua Propinsi tersebut sudah merata, karena indeks Gininya masih diatas 0,50 atau masih mendekati 1. Indeks Gini Propinsi Sumatera Selatan di tahun 2003 sebesar 0,74, hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Sumatera Selatan berangsur membaik. Begitu juga dengan Propinsi Bengkulu yang mengalami penurunan yaitu sebesar 0,76. Jika dibandingkan dengan Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan lebih baik tingkat ketimpangannya, walaupun selisihnya hanya dua

Tahun 2004, Indeks Gini Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu menurun, menunjukkan bahwa tingkat distribusi pendapatan di kedua propinsi tersebut berangsur membaik dibanding tiga tahun sebelumnya, dimana indeks Gini untuk Propinsi Sumatera Selatan sebesar 0,64 dan Propinsi Bengkulu sebesar 0,65. Dengan kata lain, distribusi pendapatan di tahun 2004 Propinsi

Sumatera Selatan dan Bengkulu kurang merata.

4.2 Analisis Ketimpangan Indeks Williamson

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan dari Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu, berikut ini akan dibahas mengenai perkembangan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dalam hal ini, kecenderungan pemerataan pembangunan antar wilayah dianalisis dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Regional (*Regional Inequality*) yang semula digunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Indeks Williamson yang digunakan dalam analisis ini menggunakan timbangan rasio penduduk di tiap propinsi terhadap total penduduk seluruh propinsi. Dengan alat analisis tersebut, walaupun suatu propinsi mempunyai PDRB per kapita yang ekstrim tinggi, namun kalau jumlah penduduknya relatif kecil, maka tidak terlalu menyebabkan ketimpangan yang tinggi. Sebaliknya, walaupun besaran PDRB per kapita suatu propinsi hanya moderat saja dibandingkan propinsi lain yang kecil, namun kalau jumlah penduduknya relatif besar maka akan menyebabkan ketimpangan secara keseluruhan. Indeks ketimpangan Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar dari atau sama dengan nol – bernilai nol berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah, lebih besar dari nol menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar daerah – semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar gejala ketimpangan antar pembangunan daerah.

Tabel 5
Perhitungan Indeks Williamson (Dalam Persen)

Tahun	Sumatera Selatan	Bengkulu
2002	0,18	0,48
2003	0,14	0,40
2004	0,13	0,42
2005	0,05	0,42
Rata-rata	0.125	0.43

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2002, tingkat ketimpangan Propinsi Sumatera Selatan mencapai 0,18 atau tingkat ketimpangan baik. Jika dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2003, tingkat ketimpangan menjadi lebih baik lagi yang mencapai 0,14. Sama seperti tahun sebelumnya, tingkat ketimpangan Propinsi Sumatera Selatan tidak berbeda jauh yaitu mencapai 0,13. Untuk tahun 2005, tingkat ketimpangan Propinsi Sumatera Selatan hanya mencapai 0,05 yang berarti bahwa Sumatera Selatan telah berhasil memperkecil angka ketimpangannya dan tingkat ketimpangannya menjadi semakin baik. Dari periode tersebut ternyata pada tahun 2005, Propinsi Sumatera Selatan memiliki angka ketimpangan sebesar 0,05 yang berarti tingkat ketimpangannya sangat baik. Sedangkan untuk Propinsi Bengkulu, tingkat ketimpangannya pada tahun 2002 mencapai 0,48 atau memiliki tingkat ketimpangan sedang. Pada tahun 2003, tingkat ketimpangan Propinsi Bengkulu mencapai 0,42 atau tingkat ketimpangan baik. Kemudian, pada tahun 2004 dan 2005 Propinsi Bengkulu tingkat ketimpangannya mencapai angka yang sama yaitu 0,42 atau tingkat ketimpangan sedang. Dari periode tersebut ternyata pada tahun 2004 dan 2005, Propinsi Bengkulu memiliki angka ketimpangan 0,42 yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya dan berarti tingkat

ketimpangannya juga sedang.

Apabila dibandingkan Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu ternyata Propinsi Bengkulu adalah propinsi yang memiliki IW cukup tinggi yang menunjukkan tingkat ketimpangan antar wilayah yang semakin tinggi pula. Sebaliknya, Propinsi Sumatera Selatan adalah propinsi yang memiliki tingkat IW yang rendah, artinya ketimpangan daerahnya juga rendah dan pemerataan di daerahnya menjadi tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan di Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu selama periode 2001 sampai dengan 2005. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk yang berbeda antar daerah di kedua propinsi tersebut.

Hasil penelitian Indeks Gini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan selama periode 2001 hingga 2005 cukup besar dengan rata-rata 0,77 untuk Propinsi Sumatera Selatan dan 0,78 untuk Propinsi Bengkulu. Jika dilihat nilai indeks Gini tersebut menunjukkan ketimpangan yang tinggi karena nilai indeks semakin mendekati satu.

Hasil penelitian Indeks Williamson apabila dibandingkan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu ternyata Propinsi Bengkulu adalah propinsi yang memiliki IW cukup tinggi dengan rata-rata 0,43 yang menunjukkan tingkat ketimpangan antar wilayah yang semakin tinggi pula. Sebaliknya, Propinsi Sumatera Selatan adalah propinsi yang memiliki tingkat IW yang rendah dengan rata-rata 0,125 artinya

ketimpangan daerahnya juga rendah dan pemerataan di daerahnya menjadi tinggi. Dari hasil analisis antara Indeks Willimason dengan Indeks Gini terdapat persamaan hasil. Dimana dari dua hasil perhitungan ini setiap tahun nilai ketimpangannya semakin menurun di setiap tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pemerintah di Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan antar propinsi tersebut. Terutama bagi propinsi yang memiliki potensi sumber daya yang paling rendah.
2. Bagi kalangan akademik diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis lain untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di propinsi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Selatan dalam Angka 2001-2006*. Palembang : BPS
- Badan Pusat Statistik. *Bengkulu dalam Angka 2001-2006*. Palembang: BPS
- Irawan dan Suparmoko, M. 1999. *Ekonomika Pembangunan Edisi Kelima*. BPF E Yogyakarta: Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

- Tarigan, Robinson. 2000. *Ekonomi Regional(Teori Dan Aplikasi)*.
- Zaman. 2006. *Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Sumatera Selatan*.